

Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Novita Niswani

niswaninovita@gmail.com¹

Ikhyanuddin*

Rayyan Firdaus, Nurhasanah

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh.

Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan daerah Kabupaten/Kota tahun 2016-2020 (study kasus pemerintah Provinsi Aceh). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel yaitu gabungan antara cross section data dan time series data yang diperoleh dari Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 115 sampel dengan menggunakan teknik sampel Sensus. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci : *Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan*

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten dan Kota provinsi Aceh merupakan salah satu daerah dimana kinerja keuangan mengalami kapasitas fiskal yang rendah. Rendahnya kapasitas mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa, otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Jika kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik dan benar maka semakin baik pengelolaan keuangan baik dalam hal pengelolaan belanja modal yang dilakukan oleh daerah tersebut. (Masloman et al. 2020). Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu belanja modal, dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fenomena yang terjadi saat ini diketahui bahwa sebenarnya Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu sebesar 18,71 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 15,80 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini terkait penghematan anggaran dengan adanya pandemi *Covid-19* (BPS Provinsi Aceh, 2020). Permasalahan yang terjadi pada belanja modal diketahui bahwa belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasinya mencapai Rp 9,23 triliun yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 605,956 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4,51 triliun dan untuk komponen Belanja Modal sebesar Rp 3,16 triliun dan selama masa pandemic *Covid-19* belanja modal mengalami penurunan pagu akibat dari pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia (Pemerintah Provinsi Aceh, 2020). Berlanjut pada permasalahan dana perimbangan di provinsi Aceh pada tahun 2019 sebesar Rp 4,23 triliun dan terealisasi sebesar Rp 4,28 triliun. Kelebihan tersebut disebabkan adanya transfer dana alokasi umum. terkait pembiayaan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari penerimaan pembiayaan.

Sedangkan untuk dana PAD yang direalisasikan sebesar Rp2,5 triliun. Dana Aceh diperuntukkan untuk program pembangunan dalam kisaran Rp4,6 triliun hingga Rp9,1 triliun per tahun. Namun demikian, dengan alokasi anggaran tersebut belum mencukupi untuk menuju *positive point* dalam rangka mengejar ketertinggalan Aceh. Hal ini dikarenakan Aceh masih membutuhkan anggaran besar seperti kelanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), beasiswa, sarana dan prasarana kesehatan, serta berbagai infrastruktur sebagai pendorong ekonomi Aceh, seperti pembangunan jaringan jalan sebagaimana yang telah tertuang dalam Proyek Strategis Aceh dan Proyek Strategis Kabupaten/Kota. (Safrina 2020). Berlanjut menurunnya kinerja keuangan daerah menurun di tahun 2020, dimana kinerja keuangan daerah pada triwulan IV 2020 secara garis besar mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Aceh

triwulan IV 2020 tercatat terkontraksi -2,99% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi -0,11% (yoy) (LPP Aceh 2021).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menyebutkan bahwasanya relasi agensi ialah suatu perjanjian (kontrak) diantara 2 (dua) pihak, yakni agen dan prinsipal, yang mana prinsipal memberikan otoritas dan kepercayaannya kepada agen, yang mana prinsipal memberi otoritas dan kepercayaan pada agen dalam mengambil ketentuan mengatasnamakan prinsipal (Setiawan 2018).

Hubungan teori Keagenan dengan kinerja keuangan daerah adalah dimana prinsipal itu yaitu pemerintah pusat dimana pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dikerjakan oleh pemerintah Daerah. Jika kinerja keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik, kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat.

Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Halim 2016).

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Andirfa et al. 2016). Alokasi biaya ditransformasikan ke rasio efisiensi yaitu: Perhitungan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Efisiensi} = ((\text{Realisasi Pengeluaran}) / (\text{Realisasi Penerimaan})) \times 100\%$$

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 “belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara *financial* (Hardi 2019).

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Saputri 2020) dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah (*equalization grant*) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, atau bisa disebut DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya (*horizontal imbalance*).

Dana Alokasi Khusus

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dimana daerah penerima DAK harus memenuhi criteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Rumus Dana Alokasi Umum adalah:

$$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan PP Nomor 55/2005, dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Wahyudin and Hastuti 2020).

Menurut Wahyudin & Hastuti (2020) formulasi Dana Alokasi Umum adalah:

$$\frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah sebagai penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2016). Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah,
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah (Yovita 2011).

Hubungan Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah

Belanja modal memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kinerja keuangan daerah, hal ini dikarenakan pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun dan hal tersebut akan berjalan apabila keuangan daerah juga berjalan dengan lancar, demikian juga yang terjadi apabila semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak (Sari and Wati 2021).

Hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) 2) Dana Alokasi Umum (DAU) 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) (Anggreni 2019). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Tingkat kemampuan daerah dapat dilihat dari kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta tingkat ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah.

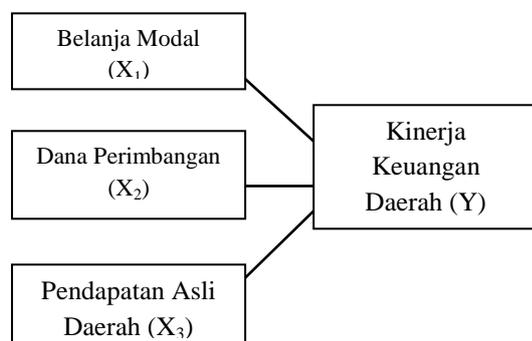
Dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimum, daerah yang mempunyai sumber daya yang sedikit membutuhkan subsidi atau Dana Perimbangan. Dengan adanya Dana Perimbangan diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber pendanaan tersebut untuk kegiatan dan proyek pemerintah yang konstruktif dan produktif sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan income yang lebih besar sehingga Pendapatan Asli Daerah akan meningkat dan nantinya daerah tersebut dapat mendanai pemerintahannya sendiri (Sari and Wati 2021).

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah

PAD memiliki hubungan dengan kinerja keuangan daerah, sebagaimana diketahui bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan meningkat. Jika suatu daerah mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut akan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi pendapatannya sudah baik sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Uraian diatas penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut :

- H1 = Ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020
- H2 = Ada pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020
- H3 = Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2016-2020. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain belanja modal, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.

Menurut (Sugiyono 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai budaya karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Target populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota.

Menurut (Sugiyono 2016) sampel adalah sebagian jumlah populasi yang terlibat dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *Sensus*. Menurut (Sugiyono 2016) metode *sensus* merupakan dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota tahun 2016-2020.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Menurut Anggreni (2019) Kinerja keuangan daerah merupakan mampu atau tidaknya pemerintah dalam merealisasikan PAD. Tinggi rendahnya PAD suatu daerah akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah, sehingga dapat dikatakan besar kecilnya suatu PAD daerah akan memengaruhi tingkat kemandirian suatu daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Menurut Anggreni (2019) belanja modal merupakan pengeluaran agar didapatnya asset (asset tetap) yang memberi kegunaan berlebih daripada sebuah periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapatalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Halim (2016) "Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Menurut Anggreni (2019) PAD merupakan penerimaan yang bersumber di daerah, yang terpungut berdasarkan aturan daerah sesuai dengan UU yang ada. Pendapatan Asli Daerah berasal daripada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan daripada laba perusahaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah.

Persamaan yang digunakan dalam model regresi data panel untuk menganalisis data tersebut dalam sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

atau

$$KKD_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Dimana:

Y = Kinerja Keuangan Daerah

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

BM = Belanja Modal

DM = Dana Perimbangan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

e_{it} = *error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan agar dapat memberikan gambaran umum tentang objek yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev	Observasi
Y	4.534435	4.610000	4.680000	2.230000	0.378736	115
X1	3.265217	3.270000	3.290000	3.230000	0.013202	115
X2	3.303739	3.310000	3.340000	2.840000	0.044965	115
X3	3.232783	3.230000	3.280000	3.190000	0.023115	115

Bedasarkan hasil deskriptif statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Kinerja Keuangan Daerah adalah sebesar 4.534435 dengan Standar Deviasi sebesar 0.378736. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dengan representasi yang baik pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Kemudian pada variabel belanja modal nilai rata-rata sebesar 3.265217 dengan standar deviasi sebesar 0.013202, hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dengan representasi yang baik pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Pada variabel dana perimbangan nilai rata-rata sebesar 3.303739 dengan standar deviasi sebesar 0.044965, hal itu menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dengan representasi yang baik pada kabupaten/kota provinsi Aceh. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai rata-rata sebesar 3.232783 dengan standar deviasi sebesar 0.023115, hal itu menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dengan representasi yang baik pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan pemilihan model diatas, model yang terbaik digunakan didalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM). Berikut adalah hasil regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM) yaitu:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20.76981	8.754664	-2.372428	0.0194
Belanja Modal	8.734549	2.816798	3.100879	0.0024

Dana Perimbangan	-0.629115	0.792291	-0.794045	0.4289
PAD	-0.351874	1.594454	-0.220686	0.8257
R-squared	0.084385	Mean dependent var		4.534435
Adjusted R-squared	0.059639	S.D. dependent var		0.378736
S.E. of regression	0.367268	Sum squared resid		14.97235
F-statistic	3.409997	Durbin-Watson stat		2.494383
Prob (F-statistic)	0.020075			

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -20.76981 + 8.734549X_1 - 0.629115X_2 - 0.351874X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

X1 = Belanja Modal

X2 = Dana Perimbangan

X3 = Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan persamaan diatas, terlihat bahwa nilai konstanta sebesar -20.76981. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah bernilai konstanta atau di anggap nol maka kinerja keuangannya akan mempunyai nilai sebesar -20.76981. Hasil dari persamaan diatas menunjukkan bahwa jika variabel belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah mengalami penurunan maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang juga akan menurun.

Belanja modal memiliki pengaruh positif (searah) terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 8,734549. Jika belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1% maka menyebabkan kinerja keuangan daerah meningkat sebesar 873,4549%. Nilai koefisien regresi variabel dana perimbangan sebesar -0.629115 yang memiliki pengaruh negatif (tidak searah) terhadap kinerja keuangan daerah. Jika dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 1% menyebabkan kinerja keuangan menurun sebesar -62.9115%. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebesar -0.351874 yang memiliki pengaruh negatif (tidak searah) terhadap kinerja keuangan daerah. Jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 1% maka kinerja keuangan menurun sebesar -35.1874% dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji Parsial (Uji t)

Penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t) sebagai penguji hipotesis. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Adapun kriteria pengambilan keputusannya dengan nilai t-tabel kemudian juga melihat nilai probability. Level

kesalahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Adapun pengujian hipotesis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20.76981	8.754664	-2.372428	0.0194
Belanja Modal	8.734549	2.816798	3.100879	0.0024
Dana Perimbangan	-0.629115	0.792291	-0.794045	0.4289
PAD	-0.351874	1.594454	-0.220686	0.8257

Berdasarkan tabel diatas penjelasan dan pembahasan hasil uji t untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Diketahui bahwa nilai t_{hitung} Belanja Modal 3,100879 dengan signifikan 0,0024. Adapun nilai t_{tabel} didalam penelitian ini dihitung dengan $df = 115-4$ adalah sebesar 1,981567 dengan signifikan 0,05. Secara parsial variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dilihat dari nilai t_{hitung} 3,100879 > t_{tabel} 1,981567 dan nilai signifikan 0,0024 < 0,05. Maka keputusan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal, maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga kinerja pemerintah daerah.

Dengan tersedianya infrastruktur yang baik maka dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan pada waktunya dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa et al. 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh (Lathifa 2019), (Hapsari et al. 2020) dan (Andirfa et al. 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal menjadi faktor yang mengindikasikan kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh secara signifikan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi Eviews 10, diketahui bahwa nilai t_{hitung} dana perimbangan sebesar -0,794045 dengan signifikan 0,4289. Adapun nilai t_{tabel} didalam penelitian ini dihitung dengan $df = 115-4$ adalah sebesar 1,981567 dengan signifikan 0,05. Secara parsial dana

perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dilihat dari nilai $t_{hitung} -0,794045 < t_{tabel} 1,981567$ dan nilai signifikan $0,4289 > 0,05$. Artinya setiap 1 % perubahan variabel Dana Perimbangan, maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah -79,4045% . Maka keputusan H_2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah.

Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, DAK dan Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andirfa *et al.* 2016), (Prastiwi and Aji 2020b), (Verawaty *et al.* 2020), (Budianto and Alexander 2016) serta (Setiawan 2018) yang mengatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi Eviews 10, diketahui bahwa nilai t_{hitung} dari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar -0.220686 dengan signifikan 0.8257. Adapun nilai t_{tabel} dalam penelitian ini dihitung dengan $df = 115-4$ adalah sebesar 1,981567 dengan signifikan 0,05. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja keuangan, dilihat dari nilai $t_{hitung} -0.220686 < t_{tabel} 1,981567$ dan nilai signifikan $0.8257 > 0,05$. Maka keputusan H_3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh, Perolehan kekayaan daerah berupa pendapatan asli daerah oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pada tahun 2019-2020 PAD di Provinsi Aceh tidak mencapai setengah dari total pendapatan, yaitu hanya sebesar 10-14 persen , maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi untuk meningkatkan kinerja keuangannya masih kurang sehingga pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk menggali potensi-potensi daerah guna memperoleh PAD yang lebih besar. Pemerintah daerah harus lebih menggali dan melihat sumber daya yang dimiliki untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerahnya, sehingga bukan hanya satu pendapatan saja yang digali, tetapi semua potensi daerah untuk memperoleh pendapatan dapat dioptimalkan pengelolannya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kadek and Indrawati 2019), (Armaja, Ibrahim, and Aliamin 2017) dan (Hapsari *et al.* 2020) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

KESIMPULAN

Secara parsial Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga kinerja pemerintah.

Secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah, maka Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah.

Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah yang baik, pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Jika pendapatan asli daerah tidak dikelola dengan baik dan optimal maka tidak dapat meningkatkan sumber kekayaan daerahnya, maka pemerintah daerah tersebut diharapkan untuk dapat melakukan perbaikan ke depannya. Pemerintah daerah harus lebih menggali dan melihat sumber daya yang dimiliki untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerahnya, sehingga bukan hanya satu pendapatan saja yang digali, tetapi semua potensi daerah untuk memperoleh pendapatan dapat dioptimalkan pengelolannya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel saja yaitu belanja modal, dana perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hasil penelitian hanya mampu menjelaskan sebagian dari faktor internal yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Saran

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan mengembangkan ruang lingkup penelitian seperti penambahan sampel di dalam penelitian dan juga penambahan variabel yaitu Dana Otonomi Khusus, Kekayaan Daerah dan Opini Audit dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreni, N. K. A. (2019). **Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah** Kabupaten Badung Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 8, No(ISSN: 2302-8912).

- Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). **Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh**. Vol 5 (3): 30–38.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, and Aliamin. 2017. “**Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan** (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh).” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3 (2): 168–81. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>.
- Budianto, Budianto, and Stanly Alexander. 2016. “**Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara**.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (4): 844–51. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i4.14511>.
- Djaenuri, A. (2012). **Hubungan Keuangan Pusat-Daerah**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ghozali, I. (2005). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**, Edisi Kelima. <https://doi.org/10.9744/jmk.10.2.pp.124-135>.
- Ghozali, I. (2011). **Tujuan Uji Normalitas: Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19**. Semarang.
- Gujarati, D., & Poter, D. (2012). **Dasar-Dasar Ekonometrika**. Jakarta: Salemba Empat.
- Hapsari, Dini Wahjoe, (2020). “**Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018) THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITUR**” 7 (2): 2743–50.
- Halim, A. (2016). **Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah**. Salemba Empat. Jakarta.
- Hardi, N. S. (2019). **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa**. 3(1), 9–18.
- Jayanti, E. D. (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Opini Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Indonesia)**. 1–35.
- Ketut, Ni, and Ayu Anggreni. 2019. “**Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali**” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali* 8 (3): 1315–45.
- Lathifa, H. (2019). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017**. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10.
- LPP Aceh. (2021). **Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh**. 105. <https://pidiekab.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/122/pertumbuhan-ekonomi-aceh-triwulan-iv-2020.html>. Diakses pada Tanggal 20 April 2021.

Machmud, Joice & Radjak, Lukfiah Irwan. (2018). **Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo** Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak **Abstrak Pendahuluan Perkembangan dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh kemampuan.** 2(1), 17–32.

Mahmudi. (2016). **Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah.** UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Pemerintah Provinsi Aceh. (2020). **Realisasi Anggaran Pendapatan Aceh Capai 100,38 Persen.** [https:// humas.acehprov. go. id/ realisasi-anggaran-pendapatan-aceh-capai-10038-persen/](https://humas.acehprov.go.id/realisasi-anggaran-pendapatan-aceh-capai-10038-persen/). Diakses pada Tanggal 20 April 2021.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 tentang **Dana Perimbangan**

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintah**

Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). **Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)**. 28(1), 89–105.

Safrina. (2020). **Gubernur Nova Perjuangkan Dana Otsus Aceh Berlanjut.** [https:// acehprov.go.id/ berita/ kategori/ pemerintahan/gubernur-nova-perjuangkan-dana-otsus-aceh-berlanjut](https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/gubernur-nova-perjuangkan-dana-otsus-aceh-berlanjut). Diakses pada Tanggal 20 April 2021. Diakses pada Tanggal 20 April 2021.

Sari, B. I., & Wati, H. (2021). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.** *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>

Sugiyono. (2016). **Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D.** Alfabeta. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak dan Retribusi Daerah.**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Dana Perimbangan Keuangan Daerah.**

Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020). **Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.** *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 19(2), 212–225.

Widarjono, A. (2013). **Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya.** Ekonosia. Jakarta.

Yani, A. (205 C.E.). **Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dalam Perspektif Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.** UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

